

Greenpeace: Sebuah Gerakan Sosial Dan Politik Hijau Di Indonesia (Kampanye Greenpeace Di Jakarta 2006-2021)

Luthfi Ridzki Fakhrian¹, Abrar², Firdaus Hadi Santosa³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
luthfiridzkifakhrian@gmail.com

Abstract

This research aims to reconstruct the Green Social and Political Movement implemented by Greenpeace from 2006 to 2021 through campaign methods. This research uses a historical approach designed in a descriptive-analytical format, based on critical analysis that follows the principles suggested in historical research. The historical method is a critical process of examining and analyzing records and remnants of the past, to show how influential Greenpeace's green social and political movements are through campaign strategies and providing solutions and recommendations in pressuring the government in Jakarta. Provide a deeper understanding of Greenpeace's efforts in responding to environmental challenges in Jakarta so that they can conduct an evaluation to produce policy regulations that are useful in addressing environmental problems in Jakarta.

Keywords: Greenpeace, Environment, Social Movements, Green Politics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi Gerakan Sosial serta Politik Hijau yang dilaksanakan Greenpeace sejak tahun 2006 hingga 2021 melalui metode kampanye. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang dirancang dalam format deskriptif-analitis, didasarkan pada analisis kritis yang mengikuti prinsip-prinsip yang disarankan dalam penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses kritis dalam memeriksa dan menganalisis catatan serta sisa-sisa masa lampau, untuk menunjukkan betapa berpengaruhnya gerakan sosial dan politik hijau yang dilakukan oleh Greenpeace melalui strategi kampanye dan pemberian solusi serta rekomendasi dalam menekan pemerintah di Jakarta. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya Greenpeace dalam menanggapi tantangan lingkungan di Jakarta sehingga mereka bisa melakukan sebuah evaluasi untuk menghasilkan regulasi kebijakan yang berguna dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Jakarta.

Kata kunci: Greenpeace, Lingkungan Hidup, Gerakan Sosial, Politik Hijau.

Copyright (c) 2024 Luthfi Ridzki Fakhrian, Abrar, Firdaus Hadi Santosa

□ Corresponding author: Luthfi Ridzki Fakhrian

Email Address: luthfiridzkifakhrian@gmail.com (Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220)

Received 12 May 2024, Accepted 15 May 2024, Published 20 May 2024

PENDAHULUAN

Perjalanan Greenpeace selama menangani isu lingkungan di Jakarta setidaknya tercatat beberapa kali aksi dan kampanye dilakukan oleh Greenpeace diantaranya ialah saat Kapal Greenpeace bernama Rainbow Warrior Tiba di Jakarta pada tahun 2006, merujuk terhadap laporan yang dimuat dalam artikel berita detiknews, setibanya di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta Utara kapal Greenpeace juga melakukan sebuah kampanye lingkungan hidup dengan menggelar openboat pada tanggal 22 April 2006 yang terbuka untuk masyarakat umum, dan memberikan salah satu pameran yang menarik pengunjung saat itu dengan memperkenalkan stasiun daur ulang yang ada di atas kapal, dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Greenpeace selama 1 hari tersebut nyatanya juga mampu menarik tidak kurang dari 500 orang pengunjung (Detiknews, 2006). Pada tahun 2008 seperti dimuat dalam artikel Kompas, tercatat Kapal Greenpeace berikutnya bernama Esperenza tiba di Jakarta dan menyuarakan penyelamatan iklim global (Kompas, 2008), di tahun 2010 Greenpeace kembali

melakukan aksinya, berkampanye dengan menggunakan sticker yang ditempelkan di KitKat, aksi ini tercatat di lakukan di beberapa pusat perbelanjaan besar di Jakarta, dalam sticker yang ditempel terdapat seruan “Nestle, berikan break untuk Hutan, Stop membeli Minyak Sawit dari Sinar Mas” (Tempo, 2010), di tahun 2013, dalam liputan Mongabay diketahui bahwa Greenpeace menggelar sebuah peluncuran Kampanye 100 persen Indonesia Hijau Damai di Jakarta dan juga mulai fokus mengadvokasi Laut Indonesia dengan merilis Kampanye Laut berjudul “Ocean Defender” (Saturi, 2013).

Greenpeace juga mulai aktif berkampanye terkait polusi udara di Jakarta pada tahun 2016 dimana Greenpeace memulai gerakannya dalam kampanye polusi udara berjudul "Clean Air Now!" di Jakarta untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat akan dampak yang dapat ditimbulkan dari polusi udara terhadap kesehatan maupun lingkungan. (Greenpeace, 2016), di tahun 2017 Greenpeace juga mengeluarkan sebuah laporan kepada publik yang saat itu mendapatkan atensi sangat besar dari masyarakat terkait masalah lingkungan di Jakarta dengan judul laporan bernama “Jakarta’s Silent Killer” (Greenpeace, 2017), di bulan Juli 2018 laporan Antara menuliskan bahwa para aktivis Greenpeace kembali memulai lagi kampanyenya kali ini Greenpeace sekaligus memberi pesan kepada atlet di Asian Games dengan melakukan kampanye polusi udara kreatif berjudul “We Breathe The Same Air” dengan menggunakan papan billboard (Setyorini, 2018).

Kualitas udara di Jakarta semakin memburuk, seperti yang diungkapkan dalam laporan lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU). Konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 telah melampaui Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang ditetapkan di atas 15 µg/m³. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat hari dengan kategori "Tidak Sehat" sebesar 51% (ISPU 2018) dan 48% (ISPU 2019). Menghadapi situasi ini, Greenpeace telah menginisiasi Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) yang bertujuan untuk mengajukan Citizen Law Suit (CLS) kepada sejumlah institusi pemerintahan. Tujuh tergugat yang dituju meliputi Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Gugatan resmi dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019, sebagai upaya untuk menegakkan hak warga negara akan udara bersih (Greenpeace, 2019). Pada tahun yang sama, Greenpeace juga aktif dalam memperjuangkan penggunaan energi terbarukan. Mereka melakukan aksi dengan menaiki patung Bundaran HI di Jakarta dan memasang spanduk yang bertuliskan "Orang Baik Pilih Energi Baik" (Irfani, 2019), seperti yang tercatat dalam artikel Tirto.

Tahun 2021 menjadi titik penting dari perjuangan Greenpeace Indonesia selama memperjuangkan isu lingkungan hidup di Jakarta, pada tahun tersebut mereka secara resmi meluncurkan sebuah “Manifesto” untuk Jakarta bernama “Jakarta Butuh Kita” yang berisi 3 permasalahan utama lingkungan hidup di Jakarta yakni, Polusi Udara dan Mobilitas, Plastik dan Limbah, dan Energi Terbarukan, selain itu manifesto tersebut juga berisi ajakan Greenpeace kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan dalam 3 permasalahan lingkungan

yang ada di Jakarta tersebut (Greenpeace, 2021). Berbagai tindakan melalui kampanye yang dilakukan Greenpeace tersebut terbilang sangat sukses dan efektif karena berhasil menarik perhatian dengan memberikan pendidikan publik kepada masyarakat, media, dan pemerintah untuk semakin peduli terhadap kondisi lingkungan, serta menjadi pengingat penting bagi pemerintah DKI Jakarta mengenai perlunya kebijakan maupun tindakan tegas dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan di Jakarta yang semakin memprihatinkan kondisinya.

Penelitian ini bertujuan guna merekonstruksi Gerakan Sosial serta Politik Hijau yang dilaksanakan Greenpeace sejak tahun 2006 hingga 2021 melalui metode kampanye.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan historis yang dirancang dalam format deskriptif-analitis, didasarkan pada analisis kritis yang mengikuti prinsip-prinsip yang disarankan dalam penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1986), metode sejarah adalah proses kritis dalam memeriksa dan menganalisis catatan serta sisa-sisa masa lampau (Gottschalk, 1986: 32).

Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap utama, yaitu:

1. Heuristik: Secara definisi, heuristik dikenal sebagai pengumpulan data atau sumber untuk mendukung topik penelitian. Peneliti membagi sumber yang dikumpulkan menjadi dua kategori: sumber primer yang berasal dari berita atau dokumen yang dirilis, keluaran dan dipublikasikan oleh Greenpeace, dengan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari Greenpeace Indonesia dan sumber sekunder yang berasal dari artikel opini, dan buku-buku yang terbit atau membahas mengenai Gerakan Sosial dan Politik Hijau di Indonesia. Buku-buku tersebut diantaranya : *“Greenesia”*, *“Gerakan Sosial Baru”*, *“Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia”*, *“Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan”*, dan *“Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa”*.
2. Kritik sumber: Selanjutnya yaitu melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Sebagaimana yang diuraikan dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo, kritik terhadap sumber dalam sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis (Kuntowijoyo, 2013: 77). Jenis pertama adalah kritik terhadap autentisitas atau keaslian sumber (kritik eksternal), yang melibatkan evaluasi terhadap keaslian sumber seperti dokumen, penulisan huruf, metode penelitian, susunan kalimat, gaya bahasa, laporan penelitian, serta seluruh penampilan fisiknya untuk menetapkan tingkat keasliannya. Jenis kedua adalah kritik terhadap kredibilitas atau kebiasaan dipercayai (kritik internal), yang memerlukan peneliti untuk memeriksa secara seksama seluruh isi dari setiap sumber yang telah ditemukan. Pada tahap kritik eksternal atau autentisitas, pemeriksaan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan keaslian sumber yang diperoleh. Sumber yang digunakan terutama berasal dari laporan penelitian dan dokumen resmi. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan dengan menguji kelayakan dan kebenaran sumber yang telah ditemukan untuk digunakan.
3. Interpretasi adalah penafsiran dilakukan terhadap sumber yang dianggap memadai dengan

mengintegrasikannya ke dalam topik penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya interpretasi akan dibagi menjadi dua jenis yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah cara menggali sumber sejarah secara holistik dan mendalam guna menemukan fakta sejarah yang bersifat tersirat. Sedangkan sintesis akan menggabungkan fakta sejarah yang terdapat dalam suatu sumber sejarah menjadi fakta sejarah baru yang mengandung hubungan, baik secara korelasi maupun secara korespondensial. Kemudian, proses berlanjut ke tahap sintesis di mana peneliti menggabungkan setiap sumber data menjadi satu informasi baru yang komprehensif. Pada tahap sintesis, peneliti kemudian menafsirkan fakta sejarah yang berasal dari berbagai tinjauan pustaka, hasil wawancara, dan dokumen lainnya dengan mencoba memberikan deskripsi yang mendalam, serta melihat pada fakta sejarah terkait topik penelitian yang telah dipilih yakni, *Greenpeace: Sebuah Gerakan Sosial Dan Politik Hijau Di Indonesia (Kampanye Greenpeace Di Jakarta 2006-2021)*.

Penulisan sejarah: Sebagai tahapan terakhir, penulisan sejarah akan menjadi proses akhir sebagai penulisan laporan penelitian, dimana seluruh fakta sejarah yang telah ditemukan dan dikumpulkan akan ditulis dengan menggunakan pendekatan lingkungan ekologis, yang akan disajikan secara deskriptif-analitis kedalam suatu karya ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Penelitian dalam bentuk ini akan dipaparkan menjadi tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Selain itu, penelitian juga akan sesuai dengan kaidah yang berlaku agar berguna untuk kalangan umum.

HASIL DAN DISKUSI

Greenpeace Sebagai Gerakan Sosial Dan Politik Hijau

1. Sejarah Greenpeace Sebagai Gerakan Sosial dan Politik Hijau

Permasalahan lingkungan telah menjadi fokus perhatian global sejak era sebelumnya, meskipun upaya serius untuk mengatasinya baru mulai dilakukan pada dekade 1970-an, terutama setelah terjadinya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia (UNCHE) di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Pada tahun 1950-an, kota-kota besar di seluruh dunia, contohnya Los Angeles, telah menghadapi tantangan lingkungan seperti polusi udara yang dihasilkan oleh emisi gas kendaraan bermotor dan pabrik. Pada akhir tahun 1953, Jepang mengalami kejadian mengerikan di Teluk Minamata yang dikenal sebagai "penyakit Minamata", disebabkan oleh keracunan metilmerkuri dan cadmium (Soemarwoto, 1981:10).

Di kawasan regional Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), permasalahan lingkungan terjadi antara lain di wilayah Serawak, Malaysia, ketika daerah itu diserang wabah penyakit malaria. Masalah lingkungan lainnya yang sering terjadi di kawasan regional ASEAN, antara lain illegal logging dan pencemaran udara akibat kebakaran atau "pembakaran" hutan yang mengganggu negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura (Akib, 2014: 6).

Di Indonesia, masalah lingkungan bukanlah hal baru. Beberapa kasus lingkungan yang mencapai tahap persidangan, antara lain kasus Limbah Tahu dan Limbah Babi di Sidoarjo, Jawa

Timur pada tahun 1989, kasus Burung Cendrawasih di Irian Jaya pada tahun 1984, kasus PT Sarana Surya Sakti di Surabaya pada tahun 1991, serta kasus PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara pada tahun 1989. Meskipun demikian, dengan kelemahan struktur dan substansi hukum yang ada, penyelesaian banyak kasus tersebut belum memenuhi harapan (Akib, 2014: 7).

Dalam hal itu dengan segala macam permasalahan yang muncul dan ditandai dengan kehadiran gerakan sosial, maka George Junus Aditjondro dalam bukunya berjudul Pola-Pola Gerakan Lingkungan, dengan merujuk pandangan sosiolog Amerika Serikat membagi gerakan lingkungan kedalam tiga komponen, yakni (Aditjondro, 2003: 149):

- a. *Public environmentalists*, yaitu individu-individu dalam masyarakat umum yang secara langsung berupaya memperbaiki kondisi lingkungan sekitar melalui tindakan dan sikap pribadi mereka.
- b. *Organized environmentalists* atau *voluntary environmentalists*, merujuk kepada individu-individu yang tergabung dalam organisasi khusus yang didirikan untuk memperbaiki lingkungan hidup, sering kali dengan jangkauan lintas negara.
- c. *Institutional environmental movement organization*, mengacu pada organisasi yang beroperasi melalui struktur birokrasi resmi yang mengklaim kewenangan dalam menangani masalah lingkungan.

Merujuk pada pemahaman diatas, maka dapat dipastikan bahwa Greenpeace sebagai sebuah organisasi termasuk ke dalam golongan organisasi gerakan sosial yang bersifat profesional. Greenpeace juga menyatakan diri sebagai organisasi gerakan sosial yang “independen dan milik bersama”, sehingga bukan hanya menjadi milik bagi individu atau kelompok tertentu. Greenpeace membuka kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berkontribusi dan melibatkan diri untuk berpartisipasi dalam setiap gerakan dan kampanyenya untuk penyelamatan Lingkungan Hidup. Bondan Andriyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam wawancara yang telah dilakukan juga memberikan pengertian yang kurang lebih sama bahwa :

(Kalau dibilang menjadi sebuah gerakan sosial, intinya kita (Greenpeace) meminta dukungan dari banyak pihak untuk membuat sebuah gerakan yang menyelamatkan lingkungan dan dukungan tersebut ujungnya (hasilnya) adalah buat (mendorong) perubahan kebijakan (oleh pemerintah.) (Wawancara, 2024).

Dengan hadirnya isu Lingkungan Hidup yang kompleks maka sebagai sebuah gerakan sosial Greenpeace memerlukan beberapa pendekatan dalam memperjuangkan isu tersebut salah satunya menggunakan pendekatan dimensi politik hijau.). Dalam wawancara yang dilakukan Bondan Andriyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia juga memberikan pernyataannya terkait hal tersebut bahwa :

(Kalau dibilang menjadi politik hijau, mungkin agak berbeda dengan gerakan partai hijau (politik praktis) yang ada di Eropa ya yang berupa partai. Saat ini kita belum sampai kepada taraf berpolitik hijau (dengan partai politik) tapi ujungnya (mungkin kesana dengan hasil perubahan

kebijakan), (seperti saat ini) karena momennya saat ini adalah pemilihan presiden (Pilpres 2024) kita memanfaatkan momen itu memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemilih, agar memilih pemimpin yang bisa menyelamatkan lingkungan ke depannya gitu, jadi (saat) ini lebih ke momentum seluruhnya.) (Wawancara, 2024).

Dimensi politik hijau tersebut terdapat dua aktor utama yang memainkan peranan penting dalam memperjuangkan isu lingkungan (Hidayat, 2011: 15). Pertama, Aktor Negara yang dalam hal ini memainkan perannya sebagai satu Aktor Langsung sehingga secara langsung dapat memiliki pengaruh dan keterlibatan yang cukup signifikan dan besar dalam keberhasilan dari politik hijau. Kedua, terdapat juga Aktor Tidak Langsung yang juga memiliki peran yang besar terhadap isu Lingkungan Hidup salah satunya organisasi yang di kategorikan sebagai LSM Global.

a. Greenpeace Sebagai LSM Global

Sebagai organisasi global yang telah berdiri selama lebih dari 50 tahun, Greenpeace berhasil mendapatkan dukungan yang luas sehingga dapat menerima pendanaan langsung yang dihimpun melalui kontribusi individu yang diperkirakan berjumlah 2,8 juta pendukung keuangan, dan juga dari yayasan amal, namun, meski begitu hingga hari ini Greenpeace sama sekali belum pernah menerima dana dari pemerintah ataupun korporasi (Greenpeace, 2024).

Kampanye anti perburuan paus pada tahun 1973, dimana pada waktu itu dengan menggunakan perahu karet, Greenpeace menjalin kontak langsung dengan kapal pemburu ikan paus yang waktu itu banyak dikuasai oleh pemerintah dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Uni Soviet, dan Jepang. Meskipun kegiatan Greenpeace semakin populer, antusiasme masyarakat terhadap isu lingkungan pada waktu itu nyatanya terus menurun dan membuat Greenpeace mengalami masalah keuangan pada tahun 1976 (Greenpeace, 2024).

Greenpeace juga mulai memprotes pemusnahan anak anjing laut pada tahun 1976, berkampanye melawan racun dan polusi pada pertengahan tahun 1979-an, dan berkampanye melawan hujan asam, polusi udara, penipisan ozon, dan pemanasan global pada tahun 1990-an.

Pada tahun 1972, Greenpeace melancarkan sebuah ekspedisi besar-besaran ke Moruroa Atoll yang terletak di Samudera Pasifik, dengan tujuan untuk menyampaikan pandangannya dengan memprotes uji coba nuklir yang dilakukan pemerintah Perancis pada saat itu. Titik Klimaks dari kampanye ini terjadi pada tahun 1985, ketika serangan terhadap Greenpeace Rainbow Warrior menyebabkan kapal tersebut tenggelam di Pelabuhan Auckland, Selandia Baru. Peristiwa ini menjadi kejadian yang sangat tragis karena menyebabkan meninggalnya seorang fotografer bernama Fernando Pereira dan menandai titik balik dalam sejarah Greenpeace (Greenpeace, 2024). Temuan dari penyelidikan yang digelar lebih lanjut, serangan yang dilakukan terhadap Kapal Rainbow Warrior akhirnya membuka tabir atas operasi rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Perancis, seperti yang dilakukan oleh salah satu agennya yang bernama Christine Cabon, dimana dia berhasil menyusup dengan menyamar sebagai sukarelawan ke dalam organisasi Greenpeace di Selandia Baru. Pada tahun 1987, pemerintah

Francis setuju untuk mengganti kerugian dan membayar kompensasi sebesar 13 juta dolar Selandia Baru, serta secara resmi meminta maaf atas serangan terhadap Rainbow Warrior. Namun, Greenpeace tidak berhenti di situ, mereka terus melakukan perlawanan melalui kampanye menentang uji coba nuklir hingga Prancis secara resmi menghentikan program uji coba nuklirnya pada tahun 1995 (Greenpeace, 2024).

Pada tahun 2004, Greenpeace meluncurkan kampanye Kleercut sebagai respon terhadap deforestasi hutan tua di Ontario dan Alberta, Kanada, yang terkait dengan produksi tisu, termasuk merek Kleenex, oleh Kimberley-Clark Corporation. Kampanye ini berfokus pada mendidik konsumen tentang dampak produk Kleenex terhadap hutan tua, meningkatkan tekanan pada pemegang saham perusahaan dan mendorong konsumen untuk beralih ke produk kertas yang ramah lingkungan (Greenpeace, 2024).

Sebagai salah satu LSM Global yang paling berpengaruh di dunia, Greenpeace juga telah memperluas fokusnya dari hanya melakukan sebuah aksi protes terhadap uji coba nuklir hingga memperluas aksi dan kampanyenya dengan fokus isu lingkungan hidup secara global.

b. Langkah Hijau Greenpeace di Asia Tenggara

Sebagai pusat dari kawasan hijau dan paru-paru di seluruh dunia, tentu sangat tidak mengherankan jika wilayah Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang posisinya menjadi sebuah kunci yang sangat penting bagi ekosistem dunia. Beragam jenis hutan hujan tropis, hingga hutan lindung berada di kawasan ini, sehingga tak ayal secara tidak langsung menjadikan kawasan sebagai sebuah kawasan primadona bagi ekosistem alam yang ada di dunia. Namun, pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi dan industri selama 50 tahun terakhir juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat signifikan. Setidaknya dampak lingkungan yang muncul di kawasan ini juga meluas melampaui batas-batas Asia Tenggara.

Dalam aksi nyatanya di kawasan Asia Tenggara ini Greenpeace setidaknya telah melakukan banyak kampanye lingkungan (Greenpeace, 2024), seperti:

- 1) Di tahun 1990, kampanye yang dipimpin oleh Greenpeace sukses mendorong hadirnya produk hukum dari UU Republic No. 8749, atau biasa disebut " UU Udara Bersih 1999 Filipina" yang didalamnya terdapat aturan tentang larangan nasional yang sebelumnya belum pernah ada di Filipina, yaitu aturan larangan nasional pembakaran sampah.
- 2) Selanjutnya di tahun 2002, Greenpeace melakukan kampanye penolakan terhadap sumber makanan dengan rekayasa genetik di Thailand yang mendapat perhatian dari masyarakat dan mendorong pemerintah Thailand untuk memberikan label (tanda) agar konsumen dapat mengetahui produk makanan apa saja yang telah terkontaminasi rekayasa genetik.
- 3) Pada tahun 2004, Desakan yang dilakukan oleh Greenpeace dalam upaya Perlindungan terhadap paus Minke, Hiu putih, pohon merbau dan lumba-lumba jenis Irrawaddy, mendapat perhatian banyak pihak sehingga dapat terealisasi dalam konvensi perdagangan internasional satwa dan tumbuhan langka (CITES) yang saat itu di selenggarakan di

Bangkok, Thailand.

- 4) Pada tahun 2007, melalui gerakan dan perlawanan yang intens dari Greenpeace bersama dengan masyarakat Isabela, Perusahaan Minyak Bumi Nasional Filipina (PNOC) memutuskan menyetujui untuk membatalkan rencananya dalam usaha mengintegrasikan penambangan batu bara dengan proyek PLTU mine-mouth di Isabela, Filipina.
- 5) Pada tahun 2008, Setelah Greenpeace bekerja bersama mendukung kelompok perlindungan lingkungan Tapsakae untuk menghentikan pembangunan PLTU baru yang berdaya 4,000 megawatt di desa Tapsake, Propinsi Prachuab Khiri Khan, Thailand. Perusahaan listrik Thailand, Electricity Generation Authority Thailand (EGAT) menghentikan proyek mereka.
- 6) Masih ditahun 2008, Greenpeace juga berhasil mendorong Senator di Filipina akhirnya meluluskan pendanaan untuk Energi Terbarukan, dan undang-undang energi terbarukan, seperti energi angin dan matahari, untuk menjaga keamanan energi dan memerangi perubahan iklim.
- 7) Pada tahun 2009, Setelah Greenpeace melakukan tekanan yang masif terhadap pemerintah Indonesia dalam penolakannya terhadap Nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara, akhirnya Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhono mencabut rencana pembangunan PLTN dan mengatakan akan mengembangkan energi terbarukan sebagai alternatif sebelum memilih nuklir.

2. Berkembangnya Greenpeace di Indonesia

Greenpeace sendiri hadir sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Global di Indonesia pada tahun 2006. Berdasarkan putusan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu akta pendiriannya, Greenpeace Indonesia terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan HAM dengan enam pendiri sebagai sebuah organisasi independen berbadan hukum (Rouf, 2012).

a. Struktur dan Jaringan Organisasi Greenpeace di Indonesia

Sebagai LSM Global organisasi Greenpeace yang tersebar secara nasional dan regional, tidak hanya memberikan kontribusi yang terbatas dengan melakukan aksi di daerahnya saja, akan tetapi juga ikut berkontribusi dalam setiap kampanye Greenpeace yang di adakan secara internasional (widely) (Yusrifan, 2017: 3). Greenpeace Indonesia yang merupakan bagian Greenpeace Internasional yang terhimpun di dalam NRO (National Regional Offices) South East Asia (SEA), yang memiliki tiga kantor perwakilan di masing-masing wilayah meliputi Indonesia, Filipina, dan Thailand. Dimana setiap NRO ini terhubung secara langsung dengan Greenpeace International yang terletak di Belanda dan bertanggung jawab dalam melakukan dan melaksanakan kampanye yang termasuk dalam program kampanye global secara global dalam jangka panjang.

Sebagai organisasi LSM Global, maka secara garis besar setiap NRO memiliki struktur yang kurang lebih sama di seluruh dunia, dimana posisi utama dalam kepemimpinan Greenpeace di setiap NRO terletak di *Senior Management Team* (SMT) yang di dalamnya

terdiri dari *executive director*, *campaign director*, *communication director*, dan *organizational support director* (Greenpeace, 2024). *Campaign director* berwenang dalam melakukan kampanye-kampanye yang sedang dikerjakan oleh Greenpeace secara kolektif bersama dengan unit pendukung kampanye lainnya dan memimpin semua kampanye yang ada di setiap kantor NRO. *Organizational support* yang berfokus dalam mengerjakan administrasi kantor beserta keuangan dengan membawahi *organizational support* di setiap kantor NRO, sedangkan *communication director* memiliki tugas khusus yang berfokus mengurus bentuk strategi komunikasi yang dilakukan oleh Greenpeace di setiap kantor NRO, yang meliputi media, media di dunia maya (media sosial dan lainnya), serta *public outreach*. *Communication director* juga membawahi communication unit di setiap kantor NRO yang menjadi perwakilan Greenpeace di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah *executive director* yang tugasnya menjadi kepala dari sebuah NRO itu sendiri.

Dalam hal jaringan Greenpeace sebagai LSM Global telah memiliki banyak jaringan yang dapat mendukung mereka dalam menjalankan gerakan dan kampanye mereka bersifat global. Jaringan yang dimiliki oleh Greenpeace juga sangat terintegrasi, hal tersebut juga didukung oleh letak dari kantor-kantor Greenpeace yang tersebar meluas di seluruh dunia. Dalam wawancaranya tentang kolaborasi dengan berbagai pihak, Bondan Andriyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa :

(Ya tentu ketika berkampanye kita harus berkolaborasi atau beraliansi dengan organisasi lainnya, (misalnya) ketika (permasalahan) polusi udara ini kita ada banyak organisasi yang bekerja sama dengan kita (Greenpeace), ada LBH, ICCEL, kemudian Walhi, dan banyak lagi organisasi yang lain, ada Cerah gitu dan itu semua kita lakukan secara konsisten jadi ada semacam koalisi yang dibentuk di awal-awal kampanye polusi udara ini 2018, kemudian gugatan tahun 2019, sampai dimenangkan 2021, bahkan sampai menang 3 kali di 2023 kemarin, artinya konsistensi beraliansi membuat gerakan bersama akan menciptakan dukungan yang besar dan akhirnya juga akan menciptakan tekanan yang besar pada pengambil kebijakan itu yang kita lakukan) (Wawancara, 2024).

b. Tujuan, Prinsip Dasar dan Keberhasilan Greenpeace di Indonesia

Dalam rilisnya Greenpeace sendiri memiliki sebuah misi yang menjelaskan tentang organisasinya dan tujuannya, yaitu:

Greenpeace is an independent, campaigning organization that uses non-violent, creative confrontation to expose global environmental problems, and to force solutions for a green and peaceful future. Greenpeace's goal is to ensure the ability of the Earth to nurture life in all its diversity.

(Greenpeace merupakan suatu organisasi kampanye independen yang menggunakan cara konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengangkat masalah lingkungan hidup global dan memberikan solusi untuk masa depan yang damai dan bumi yang hijau. Tujuan Greenpeace

adalah menjamin kemampuan bumi untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup di bumi.) (Greenpeace, 2024).

Oleh karena itu, untuk menyongsong dan menyukseskan misi dan tujuan tersebut maka Greenpeace melakukan gerakan kampanye untuk:

- 1) Melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati.
- 2) Mencegah terjadinya pencemaran darat, laut, udara dan air.
- 3) Menghentikan ancaman nuklir.
- 4) Menawarkan perdamaian, pembebasan senjata, dan tanpa kekerasan.

Dalam menunjang misi, tujuan, dan aktivitas kampanyenya, Greenpeace memiliki prinsip dasar antara lain:

- 1) Bergerak Tanpa Kekerasan (*non-violence*).
- 2) Mandiri dan Independen (*Political Independence*).
- 3) Tidak Ada Aliansi dan Musuh Permanen.
- 4) Menawarkan Solusi.

Berdasarkan eksistensi Greenpeace di Indonesia sejak tahun 2006 dan merujuk pada rilis website Greenpeace, maka setidaknya mereka telah memperoleh 14 kemenangan dalam perjuangan lingkungan hidup yang berhasil di peroleh di Indonesia (Greenpeace, 2024), diantaranya:

- 1) Menumbuhkan kesadaran tentang dampak berbahaya dari energi listrik yang berasal dari nuklir, dengan berhasil mendorong para ulama di Pulau Jawa dan Madura untuk mengeluarkan fatwa “haram” terkait pembangunan PLTN di Indonesia pada tahun 2007.
- 2) Menghentikan pembakalan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, setelah tiga minggu melakukan aksi yang besar-besaran dan memperoleh dukungan masif dari 115.000 email untuk Unilever di tahun 2008
- 3) Membuat Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencabut rencana pembangunan PLTN dan menggantinya dengan mengembangkan energi terbarukan pada tahun 2009.
- 4) Mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkomitmen dalam usaha mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 26% dan 41% dengan bantuan internasional pada 2020 di tahun 2009.
- 5) Mendorong perubahan dalam kebijakan beberapa perusahaan multinasional seperti Nestle dan Unilever untuk membeli minyak kelapa sawit dari perusahaan yang merusak hutan dan lahan gambut di Indonesia tahun 2010.
- 6) Membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen dalam usaha melindungi dan menjaga hutan Indonesia, dengan mengumumkan moratorium untuk konsesi baru di hutan dan lahan gambut selama dua tahun di tahun 2011.
- 7) Membuat perusahaan kertas raksasa Asia Pulp and Paper mengumumkan Kebijakan

Konservasi Hutan baru mereka yang tidak akan melakukan ekspansi industri lebih lanjut di hutan dan lahan gambut tahun 2013.

- 8) Membuat perusahaan kertas raksasa, APRIL milik Royal Golden Eagle Group untuk mengakhiri kebijakan deforestasi di Indonesia tahun 2015.
- 9) Indonesia meratifikasi kesepakatan paris dan menentukan penurunan emisi sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional tahun 2016.
- 10) Dikabulkannya gugatan dari koalisi melawan limbah di Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung kepada Bupati Sumedang mengenai penerbitan izin pembuangan limbah cair tahun 2016.
- 11) Secara resmi pemerintah mengakui hak atas hutan adat, dengan menyerahkan surat keputusan hak atas hutan adat kepada Sembilan komunitas masyarakat hukum adat adat dengan total luasan 13.122,3 hektare di tahun 2016.
- 12) Mendapatkan izin pengelolaan hutan desa masyarakat Kampung Maggroholo dan Sira, Papua Barat tahun 2017.
- 13) Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral memutuskan untuk mencabut izin operasi dan produksi perusahaan tambang milik PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka tahun 2017.
- 14) Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres terkait moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan tahun 2018.
- 15) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi pembangunan PLTU baru di jaringan Jawa-Bali tahun 2018 (Greenpeace, 2024)

3. Gambaran Umum Jakarta



Gambar 1. Peta Wilayah Jakarta (Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta)

Berdasarkan kepada data yang tertera dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 171 tahun 2007, maka wilayah DKI Jakarta terdiri atas beberapa komponen, yang di dalamnya meliputi luas daratan sebesar 662,33 km² dan luas lautan yang mencapai 6.977,5 km². Secara gambaran Struktur wilayah administrasi di DKI Jakarta setidaknya di bagi dalam lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten. Dengan jumlah wilayah administrasi dibawahnya terdiri dari 44 kecamatan dan

267 kelurahan.

Tabel 1. Penduduk DKI Jakarta

No.	Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)		
		2019	2020	2021			
1	Kepulauan Seribu	24.300	27.750	28.240	1,79	2,69	2,24
2	Jakarta Selatan	2.264.700	2.226.810	2.233.860	1,18	0,75	0,40
3	Jakarta Timur	2.937.860	3.037.140	3.056.300	1,09	1,17	0,80
4	Jakarta Pusat	928.110	1.056.900	1.066.460	0,34	1,53	1,14
5	Jakarta Barat	2.589.930	2.434.510	2.440.070	1,60	0,63	0,29
6	Jakarta Utara	1.812.910	1.778.980	1.784.750	1,22	0,76	0,41
	DKI Jakarta	10.557.810	10.562.090	10.609.680	1,19	0,92	0,57

(Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta)

Jika ditinjau dari sisi kemiskinan dan pembangunan, pada tahun 2020 DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan dengan jumlah 480,86 ribu penduduk miskin. Meskipun begitu, Provinsi DKI Jakarta tetap memperoleh pencapaian yang membanggakan khususnya dalam sektor pembangunan manusia, dimana DKI Jakarta berhasil memperoleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,77 persen pada tahun 2020. Angka IPM tersebut tergolong tinggi sehingga berhasil menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia.

Greenpeace memilih Jakarta sebagai pusat gerakan dan kampanyenya, dilansir dari pernyataan Bondan Andriyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam wawancara yang telah dilakukan, ia mengatakan bahwa:

(Karena kita (Greenpeace Indonesia) melihat bahwa Jakarta ini menjadi center point ya, bagaimana seluruh Indonesia melihat Jakarta menjadi pusat dan apabila Jakarta menyuarakan satu hal, itu akan terdengar seluruh Indonesia.) (Wawancara, 2024).

Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki karakteristik yang beragam tentang keadaan iklimnya, misalnya di tahun 2015 pada oktober temperatur Provinsi DKI Jakarta tercatat menjadi yang tertinggi yaitu sekitar (30,21° C), sementara temperatur yang terendah tercatat berada di bulan Februari yaitu sekitar (27,76° C), dengan kondisi kelembaban udara yang berkisar 54 sampai 98 persen.

Perubahan iklim hingga mengarah kepada krisis iklim yang ekstrem telah membuat pergeseran musim dari kemarau dan hujan, serta ketidak teraturan cuaca. Dalam sehari, dalam hitungan jam, cuaca dapat berubah drastis dari panas terang menjadi hujan lebat. Ketidaksiapan pengembangan kota Jakarta dalam mengantisipasi, memitigasi serta beradaptasi terhadap krisis iklim dapat membuat Jakarta menjadi kota yang sangat rapuh terhadap ketidakseimbangan alam (sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan) (Joga, 2014: 11).

Kampanye Greenpeace Di Jakarta

1. Gerakan Jakarta dan Manifesto Greenpeace Jakarta Butuh Kita

Greenpeace mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk strategi kelompok lingkungan hidup di seluruh dunia. Khususnya terkait gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini

(Susanto, 2007: 18). Sebagai sebuah kota Jakarta tentu tidak luput dari ancaman nyata perubahan iklim (Greenpeace, 2020), yang nantinya bergeser di tahun 2021 dalam momentum 50 tahun Greenpeace sebagai organisasi kampanye lingkungan global. Dimana Greenpeace menerbitkan publikasi berjudul *The Big Shift: Earth First* yang berisi tantangan lima puluh tahun dalam memperjuangkan bumi. Oleh karenanya, Greenpeace fokus melakukan kampanyenya dengan cara melakukan riset, bearing witness, dan menyuarakan kerusakan lingkungan serta memberikan solusi dan rekomendasi (Greenpeace, 2021).

Berdasarkan pada hal tersebut Greenpeace juga menginisiasi lahirnya sebuah manifesto bernama “Jakarta Butuh Kita” yang telah dipublikasikan serta diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia, Selain mendorong Manifesto Jakarta Butuh Kita, di tahun 2021 Greenpeace juga mengembangkan gerakan bernama Jakarta Reborn yang mengajak masyarakat dan mendorong komitmen mereka agar bersama-sama menentukan masa depan Jakarta sebagai kota kolaboratif yang layak huni, hijau dan dicintai (Greenpeace, 2021).



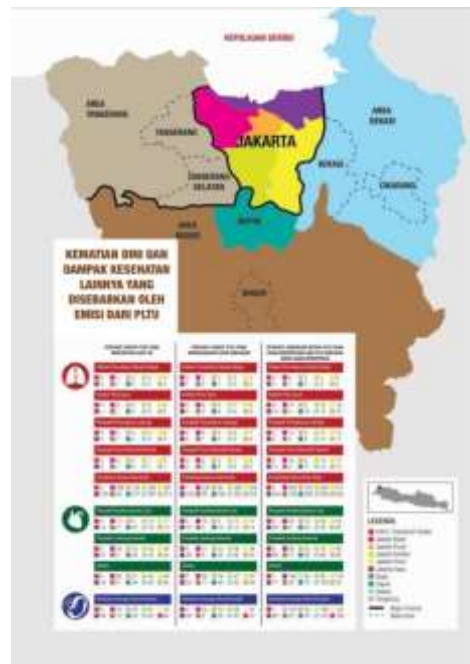
Gambar 2. Rancangan Metode Aksi “Jakarta Reborn” (Sumber: Greenpeace - *The Big Shift: Earth First* 2021)

Gerakan Jakarta Reborn juga dilatarbelakangi oleh adanya krisis utama kota selama dan setelah pandemi Covid 19, dimana terdapat ratusan ribu pengangguran di Jakarta yang telah meningkatkan ketimpangan dan semakin banyak juga orang akan hidup dalam kemiskinan. Dalam melaksanakan gerakan kelompok Jakarta Reborn pada Februari 2021, Greenpeace Indonesia juga merangkul berbagai kalangan dan gerakan masyarakat Jakarta seperti elemen kampus UNJ, Aliansi Zero Waste Indonesia, KataData, Solar Generation, IDTP, Think Policy Society, dan lain-lain (Greenpeace, 2021). Greenpeace menghadirkan Manifesto Jakarta Butuh Kita, dimana dalam manifesto tersebut terdapat tiga isu utama yakni:

a. Polusi Udara dan Mobilitas

Greenpeace pernah menggariskan bahwa kota Jakarta sebagai mega cities di dunia, ternyata juga mempunyai tingkat polusi udara yang cukup berbahaya. Tercatat dalam semester pertama 2016, tingkat polusi udara Jakarta sangat mengkhawatirkan yaitu berada pada level 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, selama Januari-Juli 2016, atau 4,5 kali dari ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius: kanker, penyakit

kardiovaskular dan pernapasan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak dan penduduk usia lanjut (Greenpeace, 2016).



Gambar 3. Peta Kematian Dini Akibat PLTU Batubara (Sumber: Greenpeace – Jakarta’s Silent Killer 2017)

Tidak hanya dalam hal tingkat kualitas udara, dampak polusi udara terhadap kesehatan dan ekonomi juga kemungkinan akan meningkat seiring dengan semakin ekstremnya kondisi atmosfer. Pada tahun 2010 saja, diperkirakan terdapat lebih dari 5,5 juta kasus penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Secara spesifik, terdapat Infeksi Pernapasan Akut (ISPA) dengan 2.450.000 kasus, jantung dengan koroner 1.246.000 kasus, asma dengan 1.211.000 kasus, pneumonia dengan 336.000 kasus, bronkopneumonia dengan 154.000 kasus, dan penyakit paru obstruktif kronis dengan 154.000 kasus. Estimasi biaya perawatan medis untuk kasus-kasus tersebut jika dikalkulasikan mencapai sekitar Rp 38,5 triliun. Ketika semakin tidak sehatnya kondisi kualitas udara dan krisis iklim di masa yang akan datang, bukan tidak mungkin kondisi kesehatan ini juga akan semakin memburuk (Greenpeace, 2010).

Greenpeace juga pernah menggerakkan sebuah inisiatif dalam bentuk partisipasi publik dimana masyarakat bahkan dapat melakukan pengamatan dasar terkait lingkungannya, seperti menyadari berubahnya kondisi udara dan sebagainya sehingga dapat mendorong mereka untuk membuat gerakan udara bersih kolektif yang bernama Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), dimana gerakan ini berhasil memenangkan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) dengan Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst kepada sejumlah institusi pemerintahan, dengan tujuh tergugat yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Dalam perjalanannya gugatan tersebut dilayangkan

secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2019 untuk menuntut hak mereka sebagai warga negara dalam mendapatkan udara bersih (Tatyana and Putra, 2022: 396). Gugatan itu pertama kali dimenangkan koalisi pada tahun 2021 dengan mengabulkan sebagian tuntutan dan berturut-turut kembali menang dalam pengadilan ditahun 2022 dan 2023. atas situasi tersebut Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat itu mengeluarkan Instruksi Gubernur (INGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 66 Tahun 2019 Tentang Perbaikan Kualitas Udara di Jakarta (Greenpeace, 2021).

b. Plastik dan Limbah

Di Jakarta sendiri Greenpeace menemukan temuan bahwa masalah sampah menjadi masalah yang paling dianggap sebagai isu lingkungan yang paling menonjol oleh masyarakat Jakarta, disusul dengan pemanasan global dan banjir (Greenpeace, 2021). World Economic Forum juga memperkirakan lebih dari 32% sampah plastik tidak ditangkap atau ditangani dan menjadi sampah yang akhirnya mengotori daratan dan lautan (Greenpeace, 2021).

Di Jakarta sendiri, volume sampah hampir menyentuh rata-rata sekitar 6000 ton per harinya, dan biasanya akan mengalami peningkatan sekitar 15% pada beberapa momentum tertentu misalnya, saat lebaran, natal dan tahun baru. Meski sangat ironis, tapi hadirnya permasalahan sampah tentu menjadi sebuah konsekuensi dari aktivitas kita sendiri sebagai manusia yang luput dari hal tersebut.

Tabel 2. Jumlah Impor Sampah dalam (Ton)

ASEAN Member States	2016	2017	2018
Malaysia	287,673	549,876	872,797
Thailand	69,487	152,244	481,381
Vietnam	347,840	659,057	492,839 ¹⁰
Indonesia	120,979	128,951	320,452
Myanmar	688	1,855	71,050 ¹¹
Philippines	4,650	4,267	11,761
Singapore	3,354	6,422	9,018
Lao People's Democratic Republic	1,181	3,008	4,791
Cambodia	647	1,685	1,688
Brunei Darussalam	30	116	185
ASEAN	836,529	1,507,481	2,265,962
% Global	5.38%	11%	27%
Global	15,553,548	13,410,919	8,358,867

(Sumber: Greenpeace – Bumi Tanpa Plastik 2021)

Greenpeace sendiri juga melakukan berbagai tindakan konkret dalam usahanya menangani permasalahan plastik dan limbah di Jakarta, salah satunya seperti yang terjadi pada tahun 2019. Dimana saat itu Greenpeace menggelar sebuah kampanye Aksi Pawai Bebas Plastik yang waktu itu juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Peikanan yakni Ibu Susi Pujiatuti. Dalam kampanye tersebut, Greenpeace menggunakan simbol plastik besar sebagai bentuk sampah plastik. Greenpeace juga menerbitkan publikasi Bumi Tanpa Plastik (2021), yang

memberikan rekomendasi terhadap pemerintah dan perusahaan, berikut adalah rekomendasinya (Greenpeace, 2021):

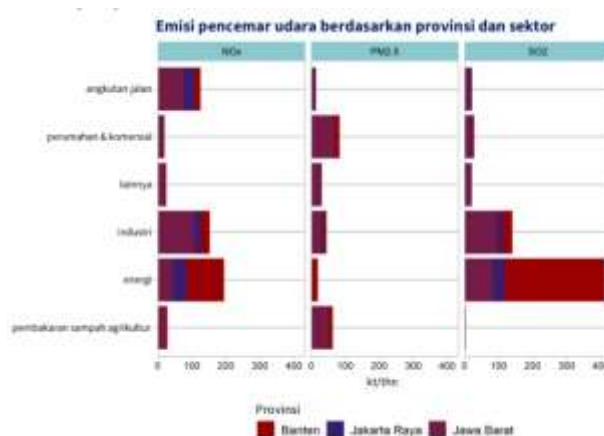
- 1) Rekomendasi untuk Perusahaan: Untuk mengatasi krisis pencemaran plastik, perlu memprioritaskan penyelesaian masalah langsung pada sumber intinya.
- 2) Rekomendasi untuk Pemerintah: Pemerintah memegang peranan penting dalam mitigasi krisis polusi plastik di Indonesia.

Dalam hal ini dengan riset Greenpeace, setidaknya perusahaan dan pemerintah mendapat dukungan penuh dari publik untuk mengambil kesempatan besar dan secara fundamental untuk mendefinisikan ulang hubungan bisnis dengan plastik, puncaknya pada 08 Desember 2021 dikeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan Dan Perusahaan

c. Energi Terbarukan

Menurut manifesto Greenpeace “Jakarta Butuh Kita”, energi terbarukan diartikan sebagai energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan, yakni proses alami yang akan terus ada dengan produktivitas tanpa batas. Contohnya adalah, energi yang berasal dari sinar matahari, air, serta angin. Situasi sekarang ini juga semakin menunjukkan bahwa kita sedang berada di fase kondisi *carbon lock-in*, yakni kondisi yang terjadi saat sistem penyediaan energi yang ada masih melanggengkan penggunaan bahan bakar fosil secara intensif sehingga menunda atau mencegah terjadinya proses transisi menuju energi alternatif yang rendah emisi karbon.

Tabel 3. Sektor Penyebab Emisi



(Sumber: CREA – Pencemaran Udara Lintas Batas di Provinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Krisma Trianisa dan kawan-kawan, dikatakan bahwa alasan pemanfaatan tambang batubara yang masih terus dilakukan oleh pemerintah ialah karena hal tersebut akan membawa keuntungan bagi pembangunan energi dan juga perekonomian (Trianisa, et al. 2020: 164). Hal ini tentu sangat disayangkan apalagi jika merujuk data dari Nationally Determined Contribution Indonesia tahun 2021, kedepan akan terdapat sekitar 58% emisi GRK (gas rumah kaca) di Indonesia yang berasal dari sektor energi di tahun

2030 mendatang.

Dalam hal ini Greenpeace merekomendasikan tiga bentuk aksi yang menurut mereka dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dari bangunan hijau, yaitu konservasi energi, efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Ketiga aksi pengurangan emisi tersebut juga sangat erat berkaitan dengan langkah sebuah kota untuk mengatasi permasalahan polusi yang buruk. Di tahun 2019, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur (INGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 66 Tahun 2019 Tentang Perbaikan Kualitas Udara Di Jakarta. Salah satu poin membahas mengenai penggunaan Panel Surya sebagai salah satu langkah untuk beralih dari ketergantungan terhadap energi fosil yang kotor. Oleh karena itu Greenpeace memberikan sebuah solusi dalam publikasi ilmiahnya berjudul Jakarta Solar City sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan (Greenpeace, 2021).

2. Kampanye dan Pemanfaatan *Digital Activism* oleh Greenpeace

Dalam hal ini, kampanye menjadi pilihan utama bagi Greenpeace dalam usahanya untuk mengangkat isu lingkungan yang sedang terjadi. Hal ini tertulis jelas dalam definisi Greenpeace sebagai sebuah organisasi.

(Sebagai organisasi yang bergerak secara global Greenpeace memulai kampanye melawan degradasi lingkungan sejak tahun 1971.) (Greenpeace, 2023).

Selaras dengan itu, Bondan Andriyanu selaku Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam wawancara yang telah dilakukan, juga turut menyatakan bahwa:

(Sejatinya Greenpeace adalah organisasi kampanye, jadi kita mengkampanyekan, menyuarakan kepada publik, meminta dukungan kepada publik, yang ujungnya adalah membuat perubahan kebijakan.) (Wawancara, 2024)

Selanjutnya sebagai gerakan sosial dan politik hijau yang memanfaatkan kampanye dengan jenis *Ideologically or cause oriented campaigns* atau *social change campaigns*, maka dalam mendorong perubahan sosial Greenpeace harus memperhatikan beberapa aspek, dalam hal ini Ostergaard (2002) mengemukakan istilah “3A” dimana menurutnya terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace agar dapat berhasil, ketiga aspek tersebut ialah *awareness*, *attitude*, dan *action*. Ketiga aspek ini penting dan sangat berguna karena merupakan sasaran pengaruh (*target of influence*) yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan yang diinginkan dapat tercipta (Venus, 2004: 9-10).

Sebagai bukti pendukung akan tahapan tersebut dalam wawancara yang dilakukan, Maulana Ikhsan selaku salah satu aktivis yang pernah mengikuti aksi dan gerakan Greenpeace Indonesia di Jakarta secara langsung mengatakan bahwa:

(Saya tertarik terhadap aksi Greenpeace karena saya melihat bahwa apa yang dibawa oleh Greenpeace salah satunya dengan banyak kajian yang mereka keluarkan sangatlah merepresentasikan permasalahan Jakarta hari ini, apalagi banyak permasalahan tersebut yang berdampak terhadap

kehidupan manusia dan hal tersebut bisa saja juga berdampak ke diri saya, oleh karena itu saya sangat mendukung gerakan mereka dan juga terdorong untuk ikut serta secara langsung untuk bergerak bersama mereka dalam upaya mengkampanyekan penyelamatan lingkungan). (Wawancara, 2024)



Gambar 4. Aksi Maulana Ikhsan Bersama Greenpeace (Sumber: Kiriman Maulana Ikhsan Via Whatshapp)

Sejalan dengan hal tersebut, Bondan Andriyanu juga mengatakan bahwa:

(Karena (dengan) dukungan dari publik harapannya bisa memberikan tekanan pada pengambilan pelajaran untuk membuat kebijakan yang bisa lebih baik dan membuat bumi lebih hijau dan damai). (Wawancara, 2024).

Salah satu yang berkembang adalah kehadiran media sosial yang juga turut menghadirkan bentuk kampanye baru dalam mendukung gerakan sosial tersebut dengan menggunakan jaringan internet secara digital yang biasa di kenal dengan “digital activism” atau aktivisme digital. Dalam wawancara yang di lakukan Bondan Andriyanu juga mengutarakan bahwa:

(Ya tentu, karena kalau dibilang digital activism ya, karena itu suara yang sangat banyak ya di dunia digital dan itu kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam platform, misalnya petisi, yang kita bilang adalah gerakan dari sosial media online ya, (tentang) bagaimana gerakan offline itu bisa mendukung gerakan offline sehingga ada kelihatan aksi nyatanya, jadi online yes dan terjadi viral, katakanlah (dapat) dukungan dari banyak hal banyak pihak gitu.) (Wawancara, 2024)

Sampai saat ini setidaknya media sosial Instagram Greenpeace Indonesia bernama @greenpeaceid telah mempunyai sekitar 741.000 pengikut dan media sosial Twitter yang bernama @GreenpeaceID telah mempunyai sekitar 967.100 pengikut. Media sosial Instagram milik Greenpeace Indonesia bisa dibilang hampir setiap hari aktif dalam menghadirkan unggahan terkait permasalahan lingkungan yang ada. Hingga saat akun Instagram tersebut telah mempunyai sekitar 4.030 unggahan yang mampu menarik banyak pihak untuk ikut memperjuangkan permasalahan lingkungan.



Gambar 5. Kampanye Greenpeace di Instagram (Sumber: Instagram Greenpeace 2018)

Greenpeace juga sering kali merilis serta menerbitkan hasil penelitiannya yang dijadikan sebagai rujukan sumber informasi untuk di sebarluaskan mengenai aktivitas mereka, seperti Press Release, Annual Report, videos, images, regional newsletter, dan international newsletter. Termaksud dalam hal ini, seperti apa yang dilakukan dalam menunjang manifesto “Jakarta Butuh Kita” Greenpeace juga membuat langkah nyata dengan mengatur beberapa bentuk model kampanye yang secara langsung menunjukkan peranan mereka dalam usahanya mempengaruhi pembuatan kebijakan serta opini publik dengan bukti-bukti ilmiah yang ada, berikut beberapa model kampanye programnya yakni:

- a. *Stop Climate Change*: dalam rangka mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi polusi udara dan dampak krisis iklim.
- b. *Save the Ocean*: dalam rangka mencegah terjadinya krisis laut lepas yang mengancam ekosistem laut akibat perburuan hewan di laut, penurunan populasi ikan, terbentuknya zona-zona mati akibat eksploitasi, pencemaran laut akibat adanya instalasi pengeboran minyak laut lepas.
- c. *Pawai Bebas Plastik*: dalam rangka mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (Greenpeace, 2024).

3. Tantangan Kampanye Greenpeace di Jakarta

Tantangan yang dihadapi Greenpeace biasanya terbagi menjadi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal Greenpeace ialah kurangnya intensitas yang masif dalam menjalankan gerakan, khususnya dalam intensitas mengadvokasi serta menekan pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan bertindak lebih tegas kepada para perusak lingkungan di Jakarta. Bondan Andriyanu sebagai Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, dalam wawancara yang telah dilakukan, juga turut menyoroti bahwa:

(Tantangan utama sebenarnya adalah ketika kampanye kita (Greenpeace) mencari ahli atau

peneliti yang mau bersuara atas kampanye yang kita lakukan, karena dalam beberapa penelitian sangat sulit mencari peneliti yang berani speak up (untuk) menyampaikan bahwa data ini adalah nyata, bahwa data ini sebenarnya juga ujungnya adalah menyalahkan pemerintah, jadi ketika narasinya menyalahkan pemerintah itu sangat sedikit peneliti yang mau menyampaikan langsung kepada kita atau berdiri bersama kita, tapi kalau narasinya general katakanlah ini berbahaya bagi kesehatan mungkin (mereka peneliti) masih mau gitu.) (Wawancara, 2024).

Selain itu tantangan eksternal Greenpeace juga datang dari bagaimana pemerintah sebagai aktor langsung dalam menyikapi serta merespon setiap keluhan terkait permasalahan lingkungan dan kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace di Jakarta, dimana dinilai sangat kurang dan terkesan tidak serius dalam menjadikannya sebuah agenda prioritas yang perlu dikejar, Bondan Andriyano sendiri menyangkan respon gerak yang lambat dari pemerintah dimana ia menyatakan bahwa:

(Sayangnya (berbagai tindakan) ini yang saat ini pemerintah kita sedang lakukan ya, yaitu (basisnya) viral based policy (jadi) kalau tidak viral tidak dilakukan tindakan nyata.). (Wawancara, 2024)

Tidak hanya berhenti disitu saja, alih-alih mendengarkan keluhan masyarakat menurut laporan VOA Indonesia pemerintah Jakarta justru memutuskan menyegel kantor Greenpeace karena terus berkampanye soal lingkungan hidup (Wardah, 2011).

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya Greenpeace dalam menanggapi tantangan lingkungan di Jakarta. Isu lingkungan merupakan salah satu fokus utama yang mempengaruhi manusia dan alam. Melalui gerakan seperti Greenpeace, diharapkan usaha untuk mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim terus diperkuat, baik di tingkat nasional maupun global. Kesimpulan dari riset ini menegaskan bahwa Greenpeace, sebagai gerakan sosial dan politik hijau, memiliki peranan sentral dalam memperjuangkan kelestarian alam dan lingkungan hidup, terutama di Jakarta. Dengan kampanye dan strategi yang digunakan, Greenpeace memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan isu lingkungan dan mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal dan global. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya peran gerakan sosial dan politik hijau seperti Greenpeace dalam menjaga lingkungan hidup untuk keberlanjutan manusia dan alam. Dukungan dan peningkatan upaya dari Greenpeace dan organisasi sejenisnya sangat diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kolaborasi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai kunci dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

REFERENSI

- Aditjondro, George Junus. 2003. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmakusumah; Iskandar, Maskun; Djajanto Basorie, Warief. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: LPDS dan Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman; Suyono. 2019. *Buku Ajar Epidemiologi Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Refika Utama.
- Biehl, Janet. 2017. *Politik Ekologi Sosial (Munisipalisme Libertarian)*. Yogyakarta: Daun Malam.
- Cook et.al., 1995. *Sociological Perspectives on Social Psychology*. Massachusetts: Needham Heights.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (diterjemahkan oleh Nugroho. Notosusanto)*. Jakarta: UI Press.
- Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hurrel, Andrew; Kingsburry, B. 1992. *The International Politics of The Environment: Actors, Interest, and Institutions*. New York: Oxford University Press.
- Jogo, Nirwono. 2014. *Greenesia Indonesia Menghijau*. Jakarta: Gramedia.
- Kebung, Konrad. 2008. *Manusia Sadar Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Keraf, Sony. 2014. *Filsafat Lingkungan hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- K. Dwi Susilo, Rachmad. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Low, Nicholas; Gleeson, Brendan. 2019. *Politik Hijau Kritik terhadap Politik Kekuasaan menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Magdoff, Fred; Bellamy Foster, John. 2018. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme*. Penerjemah Pius Ginting. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Mas'ood, Mochtar; Arfani. 1992. *Isu-isu Global Masa Kini*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Matulessy, Andik. 2005. *Mahasiswa & Gerakan Sosial*. Surabaya: Srikandi
- Porta, Donatella Della; Diani, Mario. 2006. *Social Movements: An Introduction 2nd Edition*. Malden, USA: Blackwell Publishing.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Rekayasa Sosial (Reformasi Atau Revolusi?)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Shiva, Vandana; Mies, Maria. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Singh, Rejendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Penerjemah Eko P. Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Siahaan, N.H.T. 1987. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Situmorang, A. W. 2013. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

- Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing.
- Suratmo, Gunarwan. 2004. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Triwibowo, Darmawan. 2006. Gerakan Sosial Wahana *Civil Society* bagi Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka LP3ES.
- Venus, A. 2004. Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Vincent, A. 2003. Green Political Theory. Manchester: Manchester University Press.
- Wardhana, W. A. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: ANDI.
- BLH DKI Jakarta. (2019). Menuju Udara Bersih Jakarta. *Environment Agency of DKI Jakarta, Vital Strategies*, 1–29. <https://www.vitalstrategies.org/wp-content/uploads/Menuju-Udara-Bersih-Jakarta.pdf>
- BPLHD DKI Jakarta (2011). Air Tanah Jakarta Tercemar Bakteri. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/JN_1_Nopemberr_2011_pencemaran_air.pdf.
- Dikplhd Dki Jakarta. (2018). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/kajian/2018/DIKPLHD-2018/Buku-II-DIKPLHD-Provinsi-DKI-Jakarta-2018.pdf>.
- Greenpeace Indonesia. (2016). Kita, Batubara & Polusi Udara. *Greenpeace Indonesia, April*, 1–16. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>.
- Greenpeace Indonesia. (2021). The Big Shift: Earth First. *Newsletter*, 1–8. https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/60b6e380-id_aug2021_newsletter_print.pdf.
- Greenpeace Indonesia. (2021). Jakarta Butuh Kita. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/08/5b1ff109-jakarta-butuh-kita-manifesto.pdf>.
- Greenpeace Indonesia. (2021). Bumi Tanpa Plastik : Perspektif dan Tuntutan Publik Terhadap Kontribusi Korporasi Dalam Krisis Pencemaran Plastik di Indonesia. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesiastateless/2021/02/c8fd8064-perspektif-dan-tuntutan-publik-terhadapkontribusi-korporasi-dalam-krisis-pencemaran-plastik-di-indonesia.pdf>.
- Greenpeace Southeast Asia. (2017). *Jakarta's Silent Killer : How the City's Dangerous Levels of Air Pollution Are About to Get Even Worse. October*, 1–20. [http://m.greenpeace.org/seasia/PageFiles/766576/Jakarta's Silent Killer Report - Oct 24 2017.pdf](http://m.greenpeace.org/seasia/PageFiles/766576/Jakarta's%20Silent%20Killer%20Report%20-%20Oct%2024%202017.pdf).
- Resilience Development Initiative and Greenpeace Indonesia. (2022). TRANSFORMASI

- TRANSPORTASI JAKARTA : Mengkaji ulang target emisi nol.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/12/32fdeded-transformasi-transportasi-jakarta_full-report.pdf.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi DKI Jakarta.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk2020.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2021.
<https://jakarta.bps.go.id/publication/2021/02/26/bb7fa6dd5e90b534e3fa6984/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2021.html>.
- Al-hakim, H. H., Fitri, M., & Padi, M. (2019). The Role of Greenpeace Indonesia in Managing Air Pollution in Jakarta Through 2017-2019. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5, 21758–21771. file:///C:/Users/asus/Downloads/6189-17572-1-PB.pdf
- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Sri Wahyuni, E. (2016). Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14429>
- Berlianty, Tryanita, & Meiliana, Trinita. (2023). Potensi Deforestasi di Pulau Kalimantan: Pro dan Kontra Migrasi. *International Journal of Demos*.
<https://pdfs.semanticscholar.org/cc5/4813a0e6a4f9a8a3b26debc1b4415b66e9a.pdf>
- Centre for Research on Energy and Clean Air (2020). Pencemaran Udara Lintas Batas di provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. *Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)*, 1–30.
<https://energyandcleanair.org/>
- Fuazan, Yusrifan. (2017). Strategi Greenpeace Melindungi Hutan Indonesia Tahun 2007-2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 12–23.
- Gunawan, Arthur (2023). Peran Greenpeace Dalam Menangani Pencemaran Udara Di Jakarta Tahun 2017-2021. Skripsi Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Gusman, D., & Joko Waluyo, T. (2014). Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2363>
- Hasanal Bolqiah, L., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 151–167.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.112>
- Hidayat, Alfian. (2017). Konstruksi Gerakan Sosial : Efektivitas Gerakan Lingkungan Hidup Global. *JAR : Jurnal Administrative Reform*. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/662/602>
- Iskandar, Y. (2018). Peranan Greenpeace Melalui Program Detox Campaign Dalam Mengurangi Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (Das) Citarum. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, III(1), 42–62.
- Jeklin, A. (2016). *Greenpeace's role in addressing environmental issues in China*. July, 1–23.

- Marsingga, Prillia. (2020). Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional Dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*. <http://103.135.220.51/index.php/KOMASKAM/article/view/252>
- Nazlatunnuha, Dinda Fitri. (2024). Aktivisme Greenpeace dalam Mendorong Perusahaan Shell Berkontribusi pada Perjanjian Paris. *Indonesian Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i1.480>
- Nurhidayah, G. (2022). Challenges of Greenpeace Indonesia's Supports on One Map Policy Indonesia. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 3(2), 108–129. <https://doi.org/10.51413/jisea.vol3.iss2.2022.108-129>
- Ohee, ketsia, & Anastasia, Apriani. (2022). *Analysis the Impact of the Forest Crisis on Merauke Women in the Perspective of Ecofeminism*. *Jurnal Perempuan dan Anak*. <https://doi.org/10.22219/jpa.v5i2.22152>
- Rochwulaningsih, Y. (2017). Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 151. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.16188>
- Ruhiat, F., Heryadi, D., & -, A. (2019). Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.16-30.2019>
- Sulistyo, Ilham T., & Zaman, Ali N. (2024). Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Menanganiruang Terbuka Hijau (Rth) Tahun (2017 –2022). *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.1213>
- Susanto, S. R. (2007). The Transformation of Greenpeace Strategy in the 1990s: From Civil Disobedience to Moderate Movement. *Global & Strategic*, 2, 186–205.
- Tatyana, N., & Putra, A. R. Y. (2022). Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 372–401. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.420>
- Trianisa, K., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Pengaruh Industri Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World Air Quality Index in India The Effect of Coal Industry on Air Pollution in Balance of the World Air Quality Index in India. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 6(2), 156–168.
- Tiara, Ega. (2019). Peran Greenpeace Dalam Mengatasi Polusi Udara Di Cina Tahun 2012-2017. Skripsi Digital Repository Universitas Lampung
- Van der Heijden, H. A. (2002). Political parties and NGOs in global environmental politics. *International Political Science Review*, 23(2), 187–201. <https://doi.org/10.1177/0192512102023002005>
- Webster's New Collegiate Dictionary. (1958). *International Encyclopedia of the Social Science* (Volume 5). New York. The Macmillan Company and The Free Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri (PERMEN) LHK No. 15 Tahun 2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Peraturan Menteri (PERMEN) LHK No. 20 Tahun 2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 131 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan.

Instruksi Gubernur (INGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 66 Tahun 2019 Tentang Perbaikan Kualitas Udara Di Jakarta.